

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

**Oleh:
JULITA,SE,M.Si**

ABSTRAK

Anggaran merupakan rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara setiap periode menyusun dokumen rencana anggaran yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yaitu dokumen yang menghubungkan perencanaan dan pelaksanaan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara, agar dapat mengendalikan tingkat efektifitas dan efisiensi Rencana Kerja dan Anggaran tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif. Hanya saja pada tahun 2010 perhitungan efektifitas anggaran pendapatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai tidak efektif dalam menetapkan target anggaran pendapatan karena hanya mencapai 11,28%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien. Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran belanja, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Hal ini berdampak baik bagi Instansi karena dapat melakukan penghematan dalam menggunakan anggaran belanja.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Pendapatan dan Belanja

PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjanya.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang.

Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintahan yang bertugas menangani pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjalankan segala kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini kebutuhan dana dituangkan di dalam anggaran. Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan dalam membiayai seluruh kegiatan usaha perusahaan, sehingga sangat penting penyusunan anggaran dengan baik dalam rangka membiayai operasional perusahaan untuk melihat sejauh mana anggaran biaya operasional dengan realisasinya. Hal tersebut sejalan dengan anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu aspek penting di dalam merencanakan keputusan yang akan diambil oleh manajemen, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau ketidaktepatan dalam merencanakan atau melaksanakan anggaran dapat berakibat buruk bagi perusahaan.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan realisasinya pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Tabel I. Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasinya pada Tahun 2009-2012

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi	%
2009	15.217.447.461	14.054.750.083	92,36
2010	18.969.674.502	18.587.660.743	97,99
2011	35.740.450.688	34.177.598.088	95,63
2012	42.446.440.511	40.544.259.401	95,52

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa kinerja instansi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata anggaran dari tahun 2009-2012 mencapai 95,38%. Persentase paling rendah terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 92,36%. Semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Julita dan Jufrizen (2012: 9) mengatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Deddi dan Ayuningtyas (2010: 70) mengatakan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau

aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Oleh karena itu organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Sedangkan dari pandangan sektor publik, menurut Harun (2008: 100) anggaran merupakan pernyataan kuantitatif dari perencanaan badan pemerintah yang dinyatakan baik dalam bentuk fisik maupun keuangan atau keduanya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan direncanakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang.

Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010: 71) adalah; (1) anggaran operasional dan anggaran modal (2) anggaran berdasarkan pengesahan (3) anggaran dana umum dan anggaran dana khusus (4) anggaran tetap dan anggaran fleksibel (5) anggaran eksekutif dan anggaran legislatif.

Deddi, Iswahyudi dan Maulidah (2007: 39) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu; (1) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) (2) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) (3) Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) (5) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah.

Secara garis besar Bastian (2006: 146) menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.

Tujuan prosedur penyusunan pendapatan menurut Bastian (2006: 147) adalah; (1) memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya (2) memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan.

Bastian (2006: 151) menyatakan bahwa belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank.

Tujuan prosedur penyusunan belanja menurut Bastian (2006: 151) adalah; (1) Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai belanja/biaya, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya (2) memberikan informasi mengenai alur belanja/biaya yang ada, sehingga pemda dapat memperhitungkan tingkat pengeluaran yang

memungkinkan, karena disesuaikan dengan tingkat dana yang tersedia. Dengan demikian, sistem ini dapat juga berfungsi sebagai pengendali pengeluaran.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Ihyaul (2009: 26) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran atau output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Dari beberapa pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Deddi dan ayuningtyas (2010: 161) efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain; (1) efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*), dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio output dan input (2) efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin (3) Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Organisasi seektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya.

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara; (a) Menaikkan output untuk input yang sama (b) Menaikkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input (c) Menurunkan input untuk output yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan belanja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi dengan yang telah dianggarkan. Adapun hasil analisis varians anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II. Laporan Varians (selisih) Anggaran Pendapatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2012

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2009	15.217.447.461	14.054.750.083	92,36
2010	18.969.674.502	18.587.660.743	97,99
2011	35.740.450.688	34.177.598.088	95,63
2012	42.446.440.511	40.544.259.401	95,52

Dari tabel diatas berdasarkan analisis varians (selisih), secara umum dapat dilihat bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan sangat baik walaupun tidak ada yang mampu melampaui dari yang telah dianggarkan. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2009-2012 mencapai rata-rata 95,38%. Persentase paling rendah terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 92,36%. Semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.

Tabel II. Laporan Varians (selisih) Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2012.

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2009	15.217.447.461	14.054.750.083	92,36
2010	18.969.674.502	18.587.660.743	97,99
2011	35.740.450.688	34.177.598.088	95,63
2012	42.446.440.511	40.544.259.401	95,52

Sedangkan berdasarkan analisis varians (selisih), secara umum dapat dilihat bahwa kinerja belanja yang dilihat dari realisasi pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan cukup baik. Hal ini menandakan instansi mampu melakukan pengawasan yang cukup ketat sehingga tidak terjadi kelebihan realisasi anggaran dari anggaran yang sudah dianggarkan pada tahun 2009-2012.

Sedangkan hasil analisis rasio efektivitas pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. Rasio Efektivitas Pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2012.

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Analisis Efektivitas
2009	1.000.000	2.550.000	255 %	Sangat efektif
2010	4.677.253.000	527.600.500	11,28%	Tidak efektif
2011	1.000.000.000	1.604.469.100	160,45%	Sangat efektif
2012	2.433.416.416	1.849.037.335	75,99%	Kurang efektif

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 dan 2011 dinilai sangat efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu sebesar 255% dan 160,45%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran pendapatan lebih besar dari target anggaran pendapatan. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2012 rasio efektivitas pendapatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak efektif dan kurang efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu hanya mencapai 11,28 dan 75,99%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran pendapatan lebih kecil dari target anggaran pendapatan.

Hasil analisis rasio efisiensi pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. Rasio Efisiensi Pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2012.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio efisiensi	Analisis efisiensi
2009	15.217.447.461	14.054.750.083	92,36%	Efisien
2010	18.969.674.502	18.587.660.743	97,99%	Efisien
2011	35.740.450.688	34.177.598.088	95,63%	Efisien
2012	42.446.440.511	40.544.259.401	95,52%	Efisien

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efisiensi pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan karena realisasi pendapatan tidak melebihi dari apa yang sudah dianggarkan.

Hasil analisis rasio efisiensi belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. Rasio Efisiensi Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2012.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio efisiensi	Analisis efisiensi
2009	15.217.447.461	14.054.750.083	92,36%	Efisien
2010	18.969.674.502	18.587.660.743	97,99%	Efisien
2011	35.740.450.688	34.177.598.088	95,63%	Efisien
2012	42.446.440.511	40.544.259.401	95,52%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja karena instansi dapat berhemat dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil dari analisis anggaran pendapatan belanja daerah dengan realisasinya pada badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) tahun anggaran 2009 – 2012 dengan menggunakan analisis varians, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) secara umum dapat dikatakan sudah baik dan kinerja belanja pada badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) dilihat dari analisis varians secara umum juga dapat dikatakan sudah baik.
2. Hasil dari analisis kinerja pengelolaan APBD pada pendapatan dan belanja badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) pada tahun anggaran 2009 – 2012 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 – 2012 bahwa kinerja badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) dinilai sangat efektif. Sedangkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2009 – 2012 badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) juga dinilai sangat efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Hal ini berdampak baik bagi instansi karena dapat melakukan penghematan dalam menggunakan anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra, (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Harun, (2008). *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Deddi dan Ayuningtyas, (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nafarin, M (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Julita dan Jufrizen, (2012). *Budgeting*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. penerbit alvabeta,cv. Bandung.
- Renjowijoyo, Muindro (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Ulum, Ihyaul (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

- Mariza, Addina (2009). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Proposal Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sunandar. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPKBKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal*. Jurnal. Dosen Program Studi Akuntansi Poloteknik Harapan Bersama.
- Andriana, Novia. (2011). *Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Di Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang*. Jurnal.
- www.google.com -<http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>

